

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Deskripsi Informan

Subjek penelitian atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam pengimplementasian dari kebijakan ini. Informasi diterima dari informan berupa data primer melalui hasil wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti. Data primer yaitu hasil wawancara yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan. Pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan	Jabatan
Informan 1	Staff Subbag Pemerintahan Umum, Bagian Tata Pemerintahan, Sekertariat Daerah Kota Semarang
Informan 2	Kepala Urusan (Kaur) Bagian Bakti TNI, Staff Teritorial, Kodim BS/0733
Informan 3	Staff Subbag Perencanaan Umum, Bagian Perencanaan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Informan 4	Kasi Pemerintahan, Kecamatan Gunung Pati
Informan 5	Anggota Masyarakat Kelurahan Patemo
Informan 6	Anggota Masyarakat Kelurahan Pakintelan

3.2 Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu kegiatan dalam proses kebijakan publik. Menurut Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. (Pasolong 2008:57 – 58).

Implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang merupakan salah satu dari proses kebijakan yang dilakukan dengan ukuran ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang terdiri dari program fisik dan non fisik. Program fisik meliputi meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang umumnya berada di pedesaan, sedangkan program non fisik berupa kesadaran bela negara, penegakan hukum serta pengetahuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada intinya pelaksanaan program TMMD sendiri memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah tertinggal di Kota Semarang, serta mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat.

Tujuan utama program TMMD adalah membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan, mendorong partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, membangun dan menumbuhkan semangat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan masyarakat khususnya para pemuda dan pemuka masyarakat, turut serta melatih jiwa kemanusiaan para pemuda khususnya para penganggur dan putus sekolah. Dari salah satu tujuan program TMMD secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan TNI bersama – sama ikut membangun daerah

yang akan dilaksanakan program TMMD guna meningkatkan derajat hidup masyarakat tersebut baik segi sosial maupun ekonomi. Selain itu juga menumbuhkan kembali sikap gotong royong diantara masyarakat dan menumbuhkan cinta tanah air. Program TMMD di Kota Semarang dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kegiatan seperti, pembangunan jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, dan perbaikan sanitasi. Dari kegiatan tersebut termasuk dalam indikator pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang nampaknya belum mencapai hasil yang maksimal. Permasalahan yang ditemukan misalnya terkait dengan partisipasi masyarakat yang masih kurang membuat TNI harus bekerja sendiri dalam menjalankan program TMMD, sehingga membuat pelaksanaan program TMMD berjalan kurang maksimal. Permasalahan lain yang muncul adalah masih terlambatnya dan kurangnya sumber dana untuk melaksanakan program TMMD karena terbelit dengan regulasi yang ada serta kurangnya partisipasi dari organisasi perangkat daerah untuk membantu program TMMD.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dalam penelitian ini digunakan fenomena penelitian sebagai panduan untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi program TMMD disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi program TMMD di Kota Semarang. Fenomena-fenomena yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.2.1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dilihat dari isi dari program TMMD dan rumusan dari program TMMD. Dari kedua sub fenomena tersebut maka dilihat apa sajakah isi dari program tersebut, apakah rumusan program TMMD dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat seperti yang tertuang dalam tujuan dari program TMMD.

a. Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan hal yang krusial dalam suatu kebijakan maka dari itu setiap implementor harus mengerti isi dari suatu kebijakan/program yang akan dilaksanakan. Dalam sub fenomena ini diteliti tentang isi dari program TMMD di Kota Semarang. Berikut ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh informan 1 selaku Staff Subbagian Pemerintahan Umum juga mengatakan :

“Isi program TMMD itu mencakup fisik dan non fisik. Kalau fisik rehab rumah, pembuatan jamban keluarga, pengaspalan jalan, pemavingan jalan, rehab mushola. Sedangkan non fisik seperti penyuluhan DBD, pelatihan buat petani, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya narkoba.”
(Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan penjelasan informan 1, pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang dibagi menjadi dua yaitu kegiatan fisik yang berupa perbaikan fasilitas umum maupun rehab rumah warga, jamban keluarga, dan perbaikan fasilitas umum, sedangkan kegiatan non fisik berupa beberapa penyuluhan sesuai dengan kondisi masyarakat disekitar. Senada dengan yang dikatakan oleh Informan 2 selaku Kaur Bakti TNI mengenai isi program TMMD :

“Untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan dalam program TMMD itu ada dua yaitu fisik dan non fisik, untuk kegiatan fisik itu disesuaikan dengan apa yang diminta oleh masyarakat setempat ataupun lokasi TMMD dengan

hasil musrenbang yang dihasilkan oleh kelurahan ke kecamatan lalu ke Kota Semarang. Jadi tiap program TMMD baik reguler maupun sengkuyung kita menyesuaikan apa yang diinginkan masyarakat bukan TNI yang menginginkan. Kemudian yang non fisik itu juga sama apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, berupa penyuluhan, pelatihan, maupun pembinaan di samping itu kita juga memberikan masukan kepada mereka tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, terus bela negara. Di samping itu ada beberapa bidang lain seperti bidang kesehatan mungkin sanitasi lingkungan dan dilihat dari kondisi yang ada saat itu atau saat pelaksanaan TMMD mungkin di desa sana sanitasinya jelek akhirnya diberi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan kerjasama dengan Dinas Kesehatan” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 2 selaku pelaksana, program TMMD masih di bagi menjadi dua jenis yaitu Sengkuyung merupakan program TMMD yang dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan TNI yang bertanggung jawab kepada Kodan dan Reguler merupakan program TMMD yang dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan TNI yang bertanggung jawab kepada Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD). Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dimana program TMMD tersebut dilaksanakan, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Menurut informan 1 selaku Subbag Pemerintahan Umum menyatakan isi program TMMD dengan kenyataan di lapangan :

“Kalau sasaran kita sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya kita survey langsung ke masyarakat.” (Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 1 selaku Subbag Pemerintahan Umum, bahwa pelaksanaan program TMMD sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dari pihak Tata Pemerintahan melakukan survey secara langsung. Senada dengan informan 1, informan 2 selaku Kaur Bakti TNI menyatakan :

“Sementara seperti yang kita laksanakan pada awal awal lalu ataupun sejak TMMD di laksanakan itu ya tepat dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat, itu dapat kita ketahui masyarakat itu sendiri setelah kita

melaksanakan TMMD kan kita juga sedikit menanyakan kepada masyarakat tetang tanggapan program TMMD dan itu sampai saat ini ada beberapa masyarakat menyampaikan ingin program tersebut di lanjutkan, dan ada beberapa program fisik yang tidak di sentuh, maunya TNI sesuai apa yang mereka inginkan, tapi kita hanya bisa kerjakan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Adapun pernyataan dari informan 2 adalah, isi dari program TMMD sudah tepat dengan kenyataan di lapangan atau tepat sasaran, tetapi tidak dapat memenuhi semua hal yang diminta oleh masyarakat. Menurut informan 1 selaku Subbag Pemerintahan Umum ditambahkan perihal pelaksanaan di lapangan masih belum terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat:

“Masyarakat kan harapannya pasti tinggi, yang jelas tujuan yang di sasar oleh TMMD itu sudah terlaksana dengan baik harapan masyarakat itu kan juga relatif.” (Wawancara 9 November 2017)

Informan 1 menilai bahwa program TMMD sebelumnya sudah terlaksana dengan baik namun harapan dari masyarakat terlalu besar terhadap program TMMD. Adapun informan 2 selaku Kaur Bakti TNI mengungkapkan hal yang sama mengenai pelaksanaan di lapangan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat :

“Untuk harapan masyarakat terpenuhi 100% tentu belum, karena beberapa kali masyarakat tanyakan itu ada yang tidak bisa di bangun, waktu musrenbang ada yang tidak diajukan, jadi TNI nggak bisa membantu. Intinya TMMD itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat untuk belum terpenuhi 100%. Untuk tujuan dari Komando atas itu sudah terpenuhi yaitu membentuk kemandunggalan TNI dengan rakyat sehingga rakyat dan TNI bisa bersama – sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Wawancara pada 11 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan informan 2 harapan masyarakat masih belum bisa terpenuhi secara sepenuhnya itu dikarenakan pada saat pengajuan bantuan tidak diusulkan, jadi dari pihak TNI tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat karena

tidak sesuai dengan yang direncanakan ataupun yang dianggarkan. Menurut informan 5 selaku anggota masyarakat di Kelurahan Patemon yang menyatakan bahwa :

“Program TMMD sendiri cukup bagus untuk membentuk kemandirian dengan masyarakat dan bantu bantu masyarakat kurang mampu, tetapi jangan terkesan setengah - setengah untuk pelaksanaan program yang membangun rumah saya ini juga harus mengeluarkan uang sendiri agar rumah ini jadi.” (Wawancara 3 November 2017)

Adapun pernyataan informan 5, program TMMD dinilai sudah cukup bagus tetapi dalam masalah pelaksanaannya masih banyak menemui kendala dalam hal pengerjaan program sehingga program TMMD masih terasa setengah – setengah. TNI sebagai implementor dari program TMMD bertugas agar program tersebut dapat dilaksanakan secara keseluruhan tanpa membebankan masyarakat yang menjadi sasaran program. Adapun pernyataan dari informan 6 selaku anggota masyarakat di Kelurahan Pakintelan sebagai berikut :

“Sudah sesuai dengan yang saya harapkan, bantu warga yang kurang mampu terus membangun kemandirian warga dengan tentara tapi yang saya sedikit sayangkan renpon warga disini kurang antusias, seperti diajak gotong royong membangun rumah saya ini kan saya siangnya kerja jadi saya tidak bisa ikut membantu secara keseluruhan paling hanya hari minggu saja untuk hari hari biasa saya minta bantuan warga RW sini supaya membantu tentara tapi yang datang hanya satu dua orang, ya akhirnya pengerjaan rumah saya ini cukup lama.” (Wawancara 3 November 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 6, masyarakat senang dengan adanya program TMMD karena dinilai dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan TNI tetapi disisi lain ada masyarakat yang acuh terhadap program tersebut karena merasa dirinya tidak mendapatkan bantuan, hal – hal seperti ini yang dapat menghambat pelaksanaan program TMMD.

b. Rumusan Kebijakan

Pada sub fenomena ini digambarkan tentang rumusan program TMMD, berguna dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut informan 3 Staff Subbag Perencanaan Umum mengenai rumusan dari program TMMD dengan masalah kemiskinan:

“Tentunya itu di sikronkan, jadi ketika mau menunjuk seperti rumah tidak layak huni itu berdasarkan database dari warga miskin jadi kalo tidak masuk data base warga miskin tentu tidak rehab/setujui” (Wawancara 12 Oktober 2017)

Pernyataan dari informan 3, merujuk pada rumusan program TMMD sebagai program penanggulangan kemiskinan dan cara menentukan warga miskin sebagai sasaran dari program yaitu berdasarkan pada data warga miskin di Kota Semarang.

Menurut informan 1 mengungkapkan karakter kemiskinan bahwa :

“Untuk karakter di kemiskinan sendiri dalam program TMMD ada rehab rumah tidak layak huni terus ada pembangunan jalan yang setidaknya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ada lagi pelatihan dan penyuluhan agar masyarakat dapat mandiri dan memanfaatkan potensi di daerah tersebut yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut tapi kalau untuk mencakup keseluruhan ya tidak bisa di katakan mencakup semuanya.” (Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 1 ada banyak masalah yang harus dikerjakan dalam program TMMD untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga pemerintah, TNI, dan masyarakat harus bahu membahu dalam melaksanakan program TMMD supaya dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Menurut informan 3 selaku Staff Perencanaan Umum menyatakan bahwa :

“Tidak bisa menjawab secara keseluruhan dari permasalahan kemiskinan, soalnya TMMD itu hanya pancingan saja agar ada partisipasi dari masyarakat. Taruhlah uang 10jt untuk merehab rumah tidak layak huni,

ya dengan uang segitu gak bisa merehab rumah secara keseluruhan, nah pancingan masyarakat maksudnya apa ada inisiatif masyarakat untuk iuran membantu membangun rumah tersebut.” (Wawancara 12 Oktober 2017)

Berdasarkan pernyataan informan 3 pada dasarnya program TMMD belum bisa menjawab secara keseluruhan permasalahan kemiskinan dimasyarakat. Peran serta dari masyarakat yang mampu untuk ikut membantu yang kurang mampu juga diperlukan, tugas dari pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan program TMMD untuk memberikan pemahaman

Hasil dari wawancara diatas, bahwa program TMMD pada dasarnya terdiri dari program fisik dan non fisik untuk membatu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Kota Semarang. Dengan banyaknya karakteristik permasalahan kemiskinan di masyarakat dan masih belum memenuhi harapan masyarakat pemerintah Kota Semarang.

3.2.2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fenomena yang melihat bagaimana aktor dalam program TMMD untuk mengambil keputusan. Dalam fenomena ini akan melihat sejauh mana aktor pelaksana program dalam memahami perannya untuk menjalankan program TMMD.

Sebuah kebijakan atau program harus diimplementasikan secara optimal agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, tehnik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap kebijakan tidak lepas dari peran aktor dalam mengambil keputusan. Aktor dalam

kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak lepas dari kepentingan para aktor dalam mengambil keputusan. Kepentingan para aktor dalam mengambil keputusan ini yang tidak selaras dalam setiap kebijakan akan menyebabkan sulitnya mengimplementasikan kebijakan yang ingin dijelaskan.

a. Peran Sekretariat Daerah

Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang melaksanakan program TMMD di Kota Semarang menunjuk Sekretariat Daerah terutama pada bagian Tata Pemerintahan sebagai pelaksana dan perencana program TMMD yang sebelumnya dipegang oleh BAPERMAS dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) setelah adanya SOTK pada bulan Januari 2017. Peran dari Sekretariat Daerah, informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum sebagai berikut :

“Kita dalam program TMMD berperan sebagai pelaksana dan perencana walaupun perencanaan juga ada di Bappeda kita juga ikut melakukan kegiatan perencanaan, dulu yang menangani program TMMD itu Bapermas kemarin pada bulan Januari ada SOTK baru akhirnya program TMMD dilimpahkan ke bagian Tata Pemerintahan” (Wawancara 9 November 2017)

Informan 1 menjelaskan peran dari Sekretariat Daerah diprogram TMMD ialah sebagai pelaksana dan perencana. Dalam melaksanakan dan merencanakan program TMMD tentu ada berbagai permasalahan yang muncul, pernyataan informan 1 tentang bagaimana mengambil keputusan – keputusan :

“Bagian Tata Pemerintahan kan mewakili Wali Kota, jadi yang berhak mengambil keputusan itu juga Wali Kota tetapi yang mengolah permasalahan itu dari bagian Tata Pemerintahan.” (Wawancara 9 November 2017)

Informan 1 juga menyatakan mempunyai peran dalam program TMMD, Bagian Tata Pemerintahan mewakili Wali Kota dalam mengambil keputusan dari semua permasalahan saat maupun sebelum pelaksanaan program TMMD tetapi yang mengambil keputusan adalah Wali Kota, Sekertariat Daerah hanya mengolah permasalahan yang ada menjadi opsi – opsi keputusan. Penyelesaian masalah menurut informan 1 selaku Subbag Pemerintahan Umum menyatakan :

“Untuk mengambil keputusan kita selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak yang terkait jadi kita tidak bisa ambil keputusan sendiri.” (Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan informan 1 dalam mengambil keputusan dari permasalahan – permasalahan yang ada selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait tetap tidak dapat mengambil keputusan sendiri.

Hasil dari wawancara diatas pada dasarnya Sekertariat Daerah Kota Semarang ditunjuk langsung oleh Wali Kota sebagai perencana dan pelaksana dalam program TMMD, tetapi yang berhak mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada ialah Wali Kota. Dalam hal ini Sekertariat daerah tidak sepenuhnya sebagai pelaksana tetapi hanya sebatas menjalankan koordinasi saja.

b. Peran Kodim 0733 BS/Semarang

Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program TMMD di Kota Semaraang juga dibantu oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0733 BS/Semarang sebagai pelaksana lapangan bersama masyarakat untuk melaksanakan program TMMD. Sebagai pelaksana Kodim mempunyai peran dalam pelaksanaan program TMMD, berikut wawancara dengan informan 2 selaku Kaur Bakti TNI :

“Untuk peran Kodim sendiri dalam program TMMD itu sebagai pelaksana dilapangan bersama masyarakat untuk membentuk

kemanunggalan mas, makannya kita punya peran penting kalau gak ada kita ya program TMMD tidak bisa berjalan” (Wawancara 11 Oktober 2017)

Berdasarkan informan 2, Kodim mempunyai peran dalam program TMMD yaitu sebagai pelaksana lapangan beserta masyarakat untuk membentuk kemanunggalan dengan masyarakat. Sebagai pelaksana dilapangan banyak masalah yang harus dihadapi, menurut informan 2 selaku Kaur Bhakti TNI peran Kodim untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut :

“Kalau mengambil keputusan Kodim tidak serta merta mengambil keputusan karena hal ini membantu pemerintah saja sebenarnya, kalo program TMMD katakanlah yang fisik Kodim hanya melaksanakannya, kalo seputar dana – dana yang mengatur pemerintah Kota Semarang dan provinsi Jawa Tengah itu kalo yang sengkuyung, kalo yang reguler kita juga bisa mengambil keputusan karena ada dana dari komando atas dari TNI itu mengeluarkan bantuan kita juga ikut koordinasi, untuk mengambil keputusan TMMD reguler kita tidak bisa hanya sekedar koordinasi saja.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Informan 2 juga menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada Kodim tidak serta merta mengambil keputusan, untuk program TMMD sengkuyung hanya fokus pada membantu pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan program TMMD. Sedangkan untuk program TMMD reguler Kodim juga ikut dalam mengambil keputusan dikarenakan dari TNI juga mengeluarkan dana untuk program tersebut.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran dari Kodim 0733/BS Semarang dalam program TMMD di Kota Semarang yaitu sebagai pelaksana di lapangan. Selain itu dalam mengambil keputusan Kodim tidak serta merta mengambil keputusan pada intinya keputusan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak – pihak yang terlibat dalam program TMMD di Kota Semarang.

c. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Bappeda Kota Semarang merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Semarang bergerak dibidang perencanaan dan pembangunan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Semarang. Selain Sekertariat Daerah dan Kodim yang mempunyai peran tersendiri di program TMMD. Bappeda juga mempunyai peran dalam melaksanakan program TMMD, menurut informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum sebagai berikut :

“Dalam program TMMD kita mempunyai peran penting yaitu sebagai perencana dan penganggaran itu sudah termasuk tugas kita, kalau Wali Kota seperti ingin diadakannya program TMMD pasti yang merencanakan kita lalu koordinasikan dengan pihak – pihak yang terkait.” (Wawancara 12 Oktober 2017).

Informan 3, mengatakan bahwa Bappeda mempunyai peranan dalam program TMMD yaitu sebagai perencana dan penganggaran sudah sangat jelas bahwa Bappeda merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas merencanakan sebuah kebijakan yang ada di Kota Semarang termasuk juga program TMMD. Dalam mengambil keputusan menurut informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum menyatakan sebagai berikut :

“Kita selaku perencana dan penganggaran kita mempunyai kedudukan yang cukup penting yang paling penting, fungsi koordinatif seperti dinas dinas yang menganggarkan kegiatan TMMD tanpa persetujuan kami tidak ACC, untuk verifikasi rumah tidak layak huni kami juga ikut dilibatkan langsung saat survey lapangan” (Wawancara 12 Oktober 2017).

Berdasarkan informan 3, Bappeda sudah jelas dikatakan dalam mengambil keputusan dan persetujuan harus melalui Bappeda untuk dapat melaksanakan program TMMD selain itu juga dilibatkan untuk ikut survey sasaran yang akan mendapat bantuan dari program TMMD.

d. Peran Kecamatan

Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang hanya melaksanakan fungsi koordinasi di tingkat Kecamatan, dengan melimpahkan berbagai kewenangan koordinasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang diambil *locus* di Kecamatan Gunung Pati sebagai objek penelitian. Kecamatan mempunyai peran tersendiri dalam pelaksanaan program TMMD, menurut informan 4 selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Gunung Pati, sebagai berikut :

“Peran kita didalam program TMMD itu sebagai koordinator saja, dalam artian begini seumpama pemerintah Kota Semarang tahun besok mau mengadakan program TMMD di Kecamatan Gunung Pati, kita mempersiapkan Kelurahan mana yang dijadikan lokasi, untuk kelurahan yang akan dijadikan lokasi kita melihatnya dari angka kemiskinan yang paling besar se Kecamatan lalu kita ajukan ke Bappeda dan Tapem kalau mereka setuju kita langsung koordinasikan dengan kelurahan setempat untuk membuat proposal siapa saja warga yang mau diberi bantuan. Selain koordinasi kita juga membatu saat pengawasan kegiatan program TMMD dan ikut memperisapkan acara pembukaan dan penutupan program TMMD” (Wawancara 23 November 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 4, Kecamatan mempunyai peranan dalam program TMMD yaitu menjalankan fungsi koordinasi antara lokasi yang akan dilaksanakan program dengan pemerintah Kota Semarang atau pihak – pihak yang terkait dalam program TMMD, selain itu Kecamatan bertindak sebagai pengawas dan pelaksana program. Peran Kecamatan sebagai pelaksana hanya sebatas membantu dalam persiapan upacara pembukaan dan penutupan program TMMD. Informan 4 juga menyatakan tentang peran dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada :

“Keputusan terhadap permasalahan yang ada, kita selalu koordinasikan dengan instansi yang terkait, contoh seperti besok ada jadwal pemavingan

jalan tetapi sampai saat ini pavingnya belum turun, tugas kita hanya melaporkan kepada dinas terkait, ternyata permasalahannya dana belum bisa turun, sebisa mungkin kita juga cari pinjaman ke toko material untuk pembayaran nanti dibayar saat uang sudah turun” (Wawancara 23 November 2017)

Menurut pernyataan informan 4 diatas, peran Kecamatan dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada selalu dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait program TMMD. Jika sudah ditemukan permasalahan dan mencari alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut pihak Kecamatan langsung mengambil tindakan sesuai dengan permasalahan tersebut.

Hasil dari pemaparan informan 4, Kecamatan menjalankan peran sebagai pengawas dan pelaksana program TNI Manunggal Membangun Desa. Dalam hal ini Kecamatan selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dan ikut membantu pelaksanaan saat upacara pembukaan dan penutupan. Untuk pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada kecamatan juga ikut mengambil alternatif dari permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang.

e. Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu aktor penting di dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah, sama halnya juga dalam program TMMD di Kota Semarang. Masyarakat mempunyai peranan penting di dalam program TMMD dimana keterlibatan masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan program TMMD. Dengan membentuk kemandirian antara TNI dengan masyarakat merupakan tujuan utama dilaksanakannya program TMMD, menurut

informan 2 selaku Kaur Bakti TNI menuturkan peran dari masyarakat sebagai berikut :

“Adanya peran dari masyarakat didalam program TMMD sangat dibutuhkan karena salah satu tujuan dari program TMMD kan membentuk kemanunggalan antara TNI khususnya angkatan darat dengan masyarakat. Kalau tidak ada peran atau partisipasi dari masyarakat bisa dikatakan program TMMD hanya TNI membangun desa saja” (Wawancara 12 Oktober 2017).

Menurut pemaparan dari informan 2, peran dari masyarakat dalam program TMMD dapat disimpulkan, jika tidak adanya peran dari masyarakat salah satu tujuan dari pelaksanaan program TMMD yaitu membentuk kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat tidak dapat tercapai. Menurut informan 5 selaku anggota masyarakat di kelurahan patemon, peran dalam program TMMD sebagai berikut :

“Dulu adanya program TMMD suami saya ikut membantu gotong royong saja, itu saja tidak setiap hari bisa karena di hari biasa kan juga kerja jadi bisa bantuannya saat hari libur saja” (Wawancara 3 November 2017)

Pendapat yang hampir serupa dengan informan 5 juga disampaikan oleh informan 6 terkait dengan peran masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD, yaitu :

“Ikut membantu menyiapkan makanan saja untuk yang gotong royong itu saja hanya sabtu sama minggu, paling juga 3 orang sampai 4 orang. Warga sekitar sibuk kerja, sabtu minggu kadang juga ada yang kerja jadi cuma sedikit yang bantuin tentara” (Wawancara 3 November 2017)

Berdasarkan wawancara diatas peran dari masyarakat dalam melaksanakan program TMMD sangat penting di samping meringankan TNI dalam mengerjakan kegiatan fisik juga membangun rasa sengkuyung antara masyarakat dengan masyarakat lain ataupun masyarakat dengan TNI. Disamping itu banyak masyarakat yang bekerja dan hanya libur pada hari sabtu dan minggu, hal tersebut

dapat menghambat pemerintah ataupun TNI untuk mengerjakan kegiatan fisik program TMMD dengan tepat waktu.

3.2.3 Ketepatan Target

Ketepatan target yang diteliti dengan melihat sasaran dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut, kriteria dari sasaran kebijakan dan tanggapan dari masyarakat. Target yang dibuat untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan dikatakan berhasil atau gagal dapat dilihat dari target yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut.

Program TMMD di Kota Semarang secara garis besar bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membentuk rasa kemanunggalan antara masyarakat dengan TNI. Dari tujuan tersebut dapat dikatakan secara umum bahwa sasaran dari program TMMD adalah masyarakat yang kurang mampu di Kota Semarang. Menurut informan 1 selaku Staff Subbagian Pemerintahan Umum mengenai ketepatan dari sasaran dari program TMMD :

“Sudah tepat sasaran, karena kita sering berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait program TMMD, jadi apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan tepat” (Wawancara 9 November 2017)

Senada dengan informan 1, informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum menyatakan :

“Mereka masing – masing organisasi pemerintah daerah bergerak sesuai dengan tugas pokoknya masing masing.” (Wawancara 12 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan dari informan 1 dan informan 3 pada dasarnya pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sudah tepat sasaran, hal itu

dikarenakan seringnya pihak – pihak terkait dalam program TMMD berkoordinasi maka pelaksanaannya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum mengenai cara untuk mencapai target sasaran program TMMD :

“Dengan perencanaan yang baik dan koordinasi yang baik akan tercapai target sasaran program TMMD asal di dukung dengan partisipasi masyarakat yang baik kadang – kadang kita juga bingung kurangnya partisipasi masyarakat program tersebut malah belum selesai” (Wawancara 9 November 2017)

Hal serupa juga disampaikan informan 3 selaku Kaur Bhakti Masyarakat sebagai berikut :

“Cara kita mencapai target sasaran dalam program TMMD yaitu kerjasama, perencanaan, selalu koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam program TMMD, kita laksanakan bersama – sama dengan masyarakat, sehingga kita mengendalikan waktu yang ada dan mengendalikan jumlah personil yang ada kita bagi tugas dan bagi kelompok sehingga yang kita inginkan dan targetkan dapat tercapai, jadi sebelum penutupan program TMMD kita usahakan target sudah selesai semua” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Menurut informan 1 dan informan 3 cara untuk mencapai sasaran dari program TMMD yaitu dengan koordinasi yang baik serta perencanaan yang baik antara pihak – pihak yang terkait program TMMD di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sudah tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah maupun TNI. Untuk mencapai target sasaran tersebut pemerintah dan TNI selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait program TMMD.

Dilihat dari kriteria yang menjadi sasaran program TMMD menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum sebagai berikut :

“Pasti masyarakat yang kurang mampu karena sebelum di laksanakan program TMMD kita survey untuk menentukan apakah warga tersebut layak mendapat bantuan.” (Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan pernyataan informan 1 bahwa program TMMD yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat kurang mampu, karena sebelum pelaksanaan program TMMD pemerintah melakukan survey untuk memastikan masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan. Menurut informan 4 selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yaitu :

“Sudah mencakup sesuai dengan yang direncanakan kalau mencakup secara keseluruhan tentu belum karena dana pemerintah kan juga terbatas itupun kalau banyak dinas yang berpartisipasi kalau yang dinas yang berpartisipasi sedikit semakin sedikit masyarakat yang menerima bantuan.” (Wawancara 23 November 2017)

Informan 4 menyatakan, program TMMD belum mencakup secara keseluruhan masyarakat yang kurang mampu, tetapi sudah mencakup sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Informan 1 juga menyebutkan syarat – syarat dari sasaran program TMMD sebagai berikut :

“Untuk syarat – syarat sendiri yang pasti masuk data base warga miskin di Kota Semarang lalu untuk yang rehab rumah itu syaratnya lantai belum keramik, dinding masih bambu atau belum tembok.” (Wawancara 9 November 2017)

Menurut informan 1, syarat untuk menjadi sasaran program TMMD adalah masyarakat yang masuk *data base* warga miskin di Kota Semarang dan untuk syarat kegiatan rehab rumah tidak layak huni ialah lantai belum keramik dan dinding masih terbuat dari kayu atau tembok yang hampir roboh. Menurut informan 2 selaku Kaur Bakti TNI, menyatakan :

“Untuk syarat – syarat yang mengetahui dari pihak pemerintah Kota, secara garis besar syarat – syarat sasaran program TMMD berasal musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota, disitu juga langsung

di tentukan sasaran mana yang akan dilaksanakan program TMMD, kalau setahu saya itu memang kelurahan yang memang perlu segera dalam pembangunan insfrastruktur, dilihat dari tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu kelurahan.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Secara garis besar pernyataan dari informan 2 tentang syarat menjadi sasaran program TMMD dilihat dari tingkat kemiskinan tertinggi yang ada di Kelurahan se Kota Semarang dan dapat dilihat dari Kelurahan yang segera membutuhkan pembangunan insfrastruktur.

Tanggapan dari masyarakat mengenai program TMMD, menurut informan 5 selaku anggota masyarakat di Kelurahan Patemon sebagai berikut :

“Baik, untuk program TMMD masalahnya di samping bisa komunikasi langsung dengan warga juga bisa membantu warga yang kurang mampu.” (Wawancara 3 November 2017)

Senada dengan informan 5, informan 6 menuturkan tentang tanggapan adanya program TMMD sebagai berikut :

“Sebenarnya bagus, saya merasa terbantu dengan adanya program TMMD semula rumah saya ber dinding kayu menjadi dinding batako, tetapi untuk menyelesaikan rumah, saya juga mengeluarkan sedikit uang biar rumahnya bisa jadi.” (Wawancara 4 November 2017)

Berdasarkan wawancara diatas tanggapan dari masyarakat tentang adanya program TMMD sangat baik dengan membantu warga yang kurang mampu, walaupun ada satu warga yang mengeluhkan harus mengeluarkan uang sendiri untuk merampungkan kegiatan rehab rumah tidak layak huni.

Hasil wawancara oleh para informan diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sudah tepat sasaran, peran pemerintah dan TNI melakukan perencanaan dengan baik dan selalu berkoordinasi membuat pelaksanaan program TMMD diharapkan dapat berjalan dengan optimal.

Kriteria dari masyarakat yang mendapat bantuan dari program TMMD dilihat dari angka kemiskinan di Kota Semarang. Tanggapan dari masyarakat terhadap adanya program TMMD secara umum masyarakat mendukung, namun ada warga yang meyesalkan harus mengeluarkan uang pribadi untuk merampungkan salah satu kegiatan di program TMMD.

3.2.4 Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan endogen (internal) kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan eksogen (eksternal) kebijakan dengan melihat interaksi antara lembaga pelaksana kebijakan dengan media masa, interaksi antara lembaga pelaksana dengan masyarakat dan interpretasi lembaga pelaksana dalam implementasi program TMMD di Kota Semarang.

a. Lingkungan Endogen

Lingkungan endogen adalah lingkungan dimana adanya struktur formal dari bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Melihat bagaimana interaksi atau hubungan di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan endogen kebijakan mengenai bagaimana bentuk partisipasi lembaga / instansi lain terkait program TMMD. Menurut informan 2 selaku Kaur Bakti TNI, sebagai berikut :

“Ada, contohnya disperkim, kemudian dari PDAM, dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas pertanian, dan dinas perhubungan itu semuanya juga membantu melaksanakan program TMMD.”
(Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 4 selaku Kasi Pemerintahan, mengenai instansi pendukung program TMMD :

“Untuk organisasi perangkat daerah yang mendukung program TMMD setahu saya itu ada dinas Pekerjaan Umum, dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Permukiman, dan BAZ.”

“Kalau partisipasi biasanya untuk kegiatan fisik itu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, dan BAZ. Untuk yang non fisik itu Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian.” (Wawancara 23 November 2017)

Berdasarkan pernyataan dari informan 2 dan informan 4, ada beberapa instansi yang mendukung program TMMD dari kesemua instansi yang sudah dipaparkan informan ada yang membantu program fisik maupun non fisik. Dari beberapa instansi terkait program TMMD informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum menyatakan tentang hubungan antara berbagai instansi tersebut sebagai berikut :

“Bagus, mereka melaksanakan dengan sesuai fungsi koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang lain terkait dengan program TMMD kita selalu melakukan rapat – rapat koordinasi dan evaluasi.” (Wawancara pada 12 Oktober 2017)

Senada dengan informan 3, informan 1 Staff Subbag Pemerintahan Umum, perihal hubungan antara berbagai instansi program TMMD sebagai berikut :

“Untuk hubungannya baik, dengan sering atau rutin berkoordinasi dapat menjalin hubungan baik antar instansi pemerintah maupun dengan TNI itu sendiri.” (Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan pemaparan dari informan 3 dan informan 1 diatas hubungan antara instansi perencanaan, pelaksana, maupun pendukung program TMMD berjalan baik, hal ini ditunjang dengan sering berkoordinasi dan rutin untuk melakukan rapat serta evaluasi membuat hubungan antar pihak – pihak terkait program TMMD mempunyai hubungan yang baik.

b. Lingkungan Eksogen

Selain interaksi dengan lingkungan endogen, terdapat pula interaksi dengan lingkungan eksogen (eksternal) seperti media massa. Media massa memiliki peran dalam menyediakan informasi. Selama pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sejak dulu bernama ABRI Masuk Desa (AMD), berkaitan dengan interaksi dengan media massa dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang media massa terlihat cukup berperan dalam publikasi kebijakan ini. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum:

“Untuk tanggapan dari media cetak maupun media elektronik dengan adanya pelaksanaan program TMMD mendapat respon cukup positif, karena program ini bertujuan mensejahterakan masyarakat mendapat respon yang baik dari media dan masyarakat.” (Wawancara 9 November 2017)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 2 selaku Kaur Bakti TNI sebagai berikut :

“Media massa menilai program TMMD khususnya di Kota Semarang itu baik. Kita dapat apresiasi karena program TMMD membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang memang pada saat itu butuh bantuan terutama fisik.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Berdasarkan pemaparan informan 1 dan informan 2 diatas program TMMD mendapatkan tanggapan positif dari media massa baik media cetak atau media elektronik, hal positif dari program TMMD tersebut karena tentara membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang saat itu sedang membutuhkan bantuan.

Hasil wawancara dari informan – informan diatas, dapat diketahui bahwa pada lingkungan internal telah berupaya dengan baik, perencana, pelaksana, dan instansi pendukung program TMMD sering melakukan koordinasi yang bertujuan

untuk meminimalisir permasalahan saat maupun sebelum pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Media massa juga mendukung adanya program TMMD menyambut dengan respon yang cukup positif, membuat masyarakat umum menganggap adanya program TMMD untuk dilaksanakan setiap tahun.

3.2.5 Ketepatan Proses

Efektifitas kebijakan memerlukan ketepatan proses yang tepat dalam melaksanakan kebijakannya. Suatu kebijakan akan dikatakan berhasil jika seluruh pelaksana kebijakan siap melakukan program-program dari kebijakan tersebut. Dalam fenomena ini dilihat dari penerimaan masyarakat serta kesiapan dari pihak – pihak terkait untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang.

Mengenai penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan program TMMD disampaikan oleh informan 5 selaku anggota masyarakat di Kelurahan Patemon :

“Untuk masyarakat sekitar menerima dengan dilaksanakannya program TMMD. Masyarakat juga ikut membantu, dari TNI juga sendiri ngasih tau kalau minggu besok ada kerja bakti jadi masyarakat bisa bantu kerja bakti tersebut, walaupun tidak semua warga ikut.” (Wawancara 3 November 2017)

Menurut pernyataan informan 5 bahwa masyarakat di Kelurahan Patemon menerima adanya program TMMD di daerah mereka tetapi masih sedikitnya partisipasi masyarakat untuk ikut membantu tentara untuk melaksanakan kegiatan pada program TMMD masih menjadi kendala dari pihak – pihak pelaksana program. Menurut informan 6 selaku anggota masyarakat di Kelurahan Pakintelan menuturkan :

“Menerima, saya juga hanya di kasih bantuan berupa rehab rumah saya terima – terima saja. Bentuk menerimanya dengan ikut membantu pas pelaksanaan mas tapi saya tidak bisa setiap hari saya juga kerja yang tidak bisa saya tinggalkan, terus membantu menyediakan makan untuk tentaranya, serta ikut iuran agar rumah saya bisa jadi.” (Wawancara 4 November 2017)

Berdasarkan pernyataan informan 6, tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan 5, mereka menerima adanya program TMMD. Dari penuturan informan 6 turut serta membantu pelaksanaan kegiatan program TMMD tetapi tidak dapat membantu setiap saat karena warga juga harus mencari nafkah.

Secara garis besar masyarakat menerima adanya program TMMD bentuk atau cara masyarakat menerima adanya program TMMD yaitu dengan ikut membantu melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di program TMMD, tetapi tidak dapat setiap saat bisa ikut membantu karena warga mempunyai pekerjaan jadi warga dapat membantu kegiatan saat hari libur saja.

Fenomena yang kedua adalah kesiapan dari pihak – pihak terkait untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang. Menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum, kesiapan melaksanakan program TMMD yaitu :

“Untuk kesiapan kita selalu siap untuk melaksanakan program TMMD karena sudah menjadi kegiatan tahunan di Kota Semarang dan di tambah antusias dari masyarakat membuat kita lebih mempersiapkan program TMMD untuk tahun – tahun berikutnya.” (Wawancara 9 November 2017)

Pernyataan yang hampir sama juga dikatakan oleh informan 2 selaku Kaur Bakti TNI :

“Kalau kesiapan kodim selalu siap karena tentara harus selalu siap, karena sudah program tahunan sudah tahu kapan akan dilaksanakannya sehingga selalu siap dalam melaksanakannya, karena ada perencanaan awal walaupun ada perubahan kita akan segera koordinasikan atau laporkan kembali baik itu perubahan waktu ataupun perubahan sasaran fisik.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Pernyataan yang serupa juga kemudian dikatakan oleh informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum yaitu :

“Program – program reguler ya yang dilaksanakan 1 tahun dua kali, untuk penganggaran sudah disiapkan satu tahun sebelumnya jadi kita sudah siap dalam melaksanakan program TMMD.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Kemudian, informan 4 selaku Kasi Pemerrintahan menyatakan mereka siap dalam melaksanakan program TMMD tersebut :

“Untuk kesiapan dalam melaksanakan program TMMD kami selalu mempersiapkan dari tahun ini untuk dilaksanakan pada tahun besok di mulai dengan rapat koordinasi sampai penentuan lokasi, serta yang di bebaskan khusus untuk kecamatan yaitu upacara pembukaan serta penutupan.” (Wawancara 23 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dideskripsikan bahwa pihak – pihak terkait program TMMD di Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan program tersebut. Bentuk kesiapan dari para perencana maupun pelaksana adalah dengan mempersiapkan program TMMD satu tahun sebelum dilaksanakannya program tersebut, dengan waktu persiapan yang cukup panjang diharapkan pelaksanaan program TMMD dapat dilaksanakan secara maksimal.

3.3 Faktor – Faktor yang Mendukung dan Menghamabat Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang

3.3.1 Komunikasi

Komunikasi dapat mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan publik dalam pelaksanaannya. Implementasi yang baik dapat terjadi karena para pelaksana kebijakan ini mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, komunikasi juga harus tepat, akurat dan konsisten sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tidak ada kesalahpahaman antar pelaku kebijakan. Tujuan dan sasaran kebijakan yang tidak jelas atau tidak diketahui oleh sasaran kebijakan maka

kemungkinan keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Komunikasi terdiri dari transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi.

a. Transmisi

Transmisi berkaitan erat dengan bagaimana penyaluran perintah yang dibuat dan perintah tersebut untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/program. Seringkali pejabat pelaksana mengabaikan atau salah memahami terhadap keputusan - keputusan yang dikeluarkan sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut pernyataan informan 2 selaku Kaur Bakti TNI :

“Penyaluran informasi yang pasti pada saat rapat, kadang juga kalau memang mendesak lewat pesan sms atau Whats App, bisa juga penyaluran informasi lewat upacara pembukaan program TMMD jadi pada saat upacara pembukaan masyarakat bisa tau tujuan dari program TMMD itu apa saja.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Senada dengan informan 2, informan 4 selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan

Gunung Pati :

“Untuk penyaluran informasi pasti dibahas pada saat rapat koordinasi program TMMD jadi informasi dapat diterima oleh semua pihak yang menjalankan program TMMD.” (Wawancara 23 November 2017)

Lalu berikutnya hasil wawancara dengan informan 3 selaku Staff Subbag

Perencanaan Umum menambahkan :

“Kalau penyaluran informasi biasanya kita lakukan ketika ada rapat, baik itu informasi tentang lokasi pelaksanaan program TMMD, sasaran program TMMD, maupun waktu untuk melaksanakan program tersebut.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Hal serupa dinyatakan oleh informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan

Umum :

“Penyaluran informasi biasanya melalui rapat, karena menurut saya pada saat rapat para instansi dapat memberikan informasi misal tanggal sekian ada kegiatan penyuluhan tentang bahaya demam berdarah.”
(Wawancara 9 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, penyaluran informasi terkait pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang dilakukan pada saat rapat sebelum pelaksanaan TMMD, selain melalui rapat penyaluran informasi juga melalui pesan singkat jika ada informasi yang mendadak.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi erat kaitannya dengan keutuhan informasi yang jelas, akurat dan tidak ambigu. Dalam penerimaan informasi, kejelasan informasi yang tidak jelas dapat menghambat pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Kejelasan informasi ini dapat mengurangi kesalahpahaman antar pelaksana kebijakan. Menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum sebagai berikut :

“Dengan adanya rapat koordinasi membuat semua informasi itu menjadi jelas dari lokasi pelaksanaan program TMMD sampai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan di lokasi tersebut sudah jelas.”
(Wawancara 9 November 2017)

Hal serupa diungkapkan oleh informan 2 selaku Kaur Bakti TNI sebagai berikut :

“Tentu informasi yang di berikan pada saat rapat program TMMD sudah jelas dan dapat diterima oleh semua pihak termasuk kepada masyarakat juga diberi informasi terkait apa saja yang akan dikerjakan dalam program TMMD di wilayah itu” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Informan 5 selaku anggota masyarakat menyatakan terkait kejelasan informasi saat pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang :

“Sudah jelas, sebelum pelaksanaan ada orang dinas dan tentara mengunjungi rumah saya memberitahu bahwa saya dapat bantuan dari program TMMD berupa jamban keluarga. Untuk informasi kegiatan program TMMD di kelurahan ini ada jadwal kegiatannya mas di kantor kelurahan yang dijadikan tempat istirahat tentara.” (Wawancara 3 November 2017)

Senada dengan informan 5, informan 6 menyatakan terkait kejelasan informasi saat pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang :

“Untuk informasi sudah jelas, warga mendapatkan bantuan apa saja, seperti saya ini mendapat bantuan rehab rumah dana untuk rehab sendiri 10jt seperti itu sudah di jelaskan oleh pak tentara dan biasanya didepan rumah ada kayak spanduk tulisan rumah ini direhab dengan dana 10jt.” (Wawancara 4 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, bahwa kejelasan informasi dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sudah cukup jelas. Karena masyarakat dan pihak – pihak pendukung program TMMD dapat mengerti kegiatan – kegiatan saat program TMMD serta lokasi yang akan dilaksanakan program TMMD.

c. Konsistensi

Konsistensi informasi berkaitan dengan informasi yang diterima dapat konsisten serta tidak berubah-ubah saat informasi tersebut diterima oleh sasaran kebijakan. Inkonsisten informasi dapat membuat pelaksana serta sasaran kebijakan kebingungan dalam melaksanakan kebijakan. Menurut informan 1 selaku staff Subbag Pemerintahan Umum sebagai berikut:

“Konsistensi dari informasi sendiri saya rasa sudah konsisten, dengan adanya rapat koordinasi yang rutin dapat menghindari informasi yang berubah – ubah.” (Wawancara 9 November 2017)

Hal serupa diungkapkan oleh informan 2 selaku Kaur Bakti TNI sebagai berikut :

“Untuk informasi sendiri sudah cukup konsisten apalagi program ini sudah berjalan sejak dahulu jadi menurut saya informasi – informasi tersebut sudah konsisten.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, konsistensi dari pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang sudah cukup konsisten, dapat diketahui dari seringnya pihak – pihak yang terkait dalam program TMMD berkoordinasi dan sudah lama program TMMD dilaksanakan di Kota Semarang.

3.3.4 Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang tidak tersedia dengan baik akan menghambat pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat berupa kuantitas dan kualitas pegawai lingkungan internal, fasilitas kantor yang dipergunakan serta wewenang yang digunakan.

a. Kuantitas dan Kualitas Pegawai

Sumber Daya Manusia mencakup kuantitas dan kualitas pegawai sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan kuantitas yang dapat mengurangi beban yang diberikan kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaan, namun kuantitas pegawai juga harus dibarengi oleh kualitas pegawai yang baik agar kebijakan tersebut berjalan maksimal. Menurut informan 2 selaku Kaur Bakti TNI mengenai kualitas dan kuantitas pegawai sebagai berikut :

“Untuk Kodim BS sendiri soal kuantitasnya masih kurang dengan pekerjaan yang begitu berat, kita tidak cuma mengurus TMMD belum nanti ada tugas mendadak dari atasan kita memang kerja seperti jam dinas tetapi kita juga dituntut untuk siaga 24 jam seperti kalau ada kejahatan apa bencana alam kita dituntut untuk siap menghadapi itu semua. Sedangkan untuk dari kualitasnya masih bisa handle mas walaupun kuantitasnya kurang, untuk

pelaksanaan di lapangannya TNI sudah dibekali ilmu tukang jadi setiap anggota tentara tidak hanya bisa perang tapi juga bisa nukang untuk melaksanakan program TMMD.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Lalu informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum tentang kualitas dan kuantitas di lingkungan Sekertariat Daerah :

“Untuk kuantitas pegawai dalam melaksanakan program TMMD khususnya bagaian Tata Pemerintahan masih kurang, dahulu program TMMD yang menangani Bapermas dan KB karena ada sotk bulan januari kemarin sekarang jadi Sekertariat Daerah yang menangani khususnya bagian Tata Pemerintahan jadi tugas kita semakin banyak tetapi tidak dibarengi dengan kuantitas pegawainya, kalau untuk kualitas pegawai disini mempunyai kualitas yang bagus jadi semua pekerjaan bisa di kerjakan dengan baik.” (Wawancara 9 November 2017)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum sebagai berikut :

“Kualitas pegawai disini sudah baik, dapat dilihat dari riwayat pendidikan yang rata – rata pegawai Bappeda khususnya bagian perencanaan sosial dan budaya sudah sarjana semua, kalau untuk kuantitas bisa dikatakan belum cukup bagian perencanaan sosial budaya itu pekerjaannya banyak, untuk program TMMD hanya 4 orang termasuk saya mas.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kuantitas dan kualitas pegawai untuk melaksanakan program TMMD masih kurang baik. Kekurangan jumlah pegawai ini dapat menghambat pelaksanaan program TMMD itu sendiri, seperti pelaksanaan kegiatan – kegiatan TMMD menjadi tidak sesuai rencana atau bahkan lebih lama dari yang sudah dijadwalkan .

b. Fasilitas

Dalam pelaksanaan implementasi program TMMD memerlukan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Kurangnya

fasilitas yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tidak tercapai. Menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum tentang fasilitas di kantor Sekertariat Daerah, sebagai berikut :

“Kalau fasilitas di dinas sini ada AC, beberapa komputer, mesin fotocopy serta ada mobil Dinas untuk kebutuhan mobilitas ketika survey sasaran TMMD.” (Wawancara 9 November 2017)

Selanjutnya informan 2 selaku Kaur Bakti TNI menuturkan tentang fasilitas yang mendukung program TMMD :

“Fasilitas untuk pelaksanaannya sendiri kami ada alat – alat seperti sekop, cangkul, gergaji dan lain lain itu untuk menunjang kegiatan fisik tetapi dengan jumlah yang seadanya. Ada juga mobil dinas dan truk buat mobilitas saat pelaksanaan program TMMD, selain itu ada juga komputer, printer, AC itu digunakan untuk membuat laporan selain kita pelaksana teknis kita juga membuat laporan pertanggung jawaban ke pemerintah Kota Semarang dan Kodam Diponegoro sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan program TMMD.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan Umum menyatakan fasilitas di kantor Bappeda yang dapat mendukung program TMMD :

“Untuk fasilitas disini ada komputer, AC, mesin fotocopy, printer untuk menunjang pembuatan laporan program TMMD, kita juga menyiapkan ruangan atau tempat rapat untuk memudahkan rapat koordinasi program TMMD.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai fasilitas di lingkungan kantor dirasa sudah cukup memadai, ditambah lagi di lingkungan di lingkungan Kodim juga mempersiapkan fasilitas tambahan guna menunjang pelaksanaan program tetapi fasilitas berupa alat – alat untuk mendukung kegiatan – kegiatan fisik program TMMD namun alat tersebut masih terkesan seadanya.

c. Wewenang

Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Para pelaksana mempunyai wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan, namun terdapat batasan-batasan juga dalam penggunaan wewenangnya. Berikut wawancara dengan informan 2 selaku Kaur Bakti TNI mengenai penggunaan wewenang dalam pelaksanaan program TMMD :

“Dalam pelaksanaan program TMMD sendiri kami hanya sebagai pelaksana dilapangan jadi kita tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dinas – dinas untuk selalu berpartisipasi dalam program TMMD, kodim hanya mempunyai kewenangan untuk mengatur tentara untuk berpartisipasi atau ikut dalam melaksanakan program, selain itu kita sebenarnya juga mempunyai kewenangan untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam program TMMD tetapi kadang – kadang masyarakat yang ikut itu sedikit karena mungkin urusan masing – masing seperti harus bekerja, kalau sudah begitu kita juga tidak bisa memaksakan warga untuk ikut berpartisipasi.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Berikutnya pernyataan dari informan 1 selaku Staff Pemerintahan Umum menyatakan tentang penggunaan wewenang dalam pelaksanaan program TMMD :

“Kewenangan kita dipelaksanaan program TMMD ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya kita sebagai perencana sekaligus pelaksana selain merumuskan kegiatan – kegiatan program TMMD juga mengajak teman – teman dari berbagai organisasi pemerintah untuk berpartisipasi dalam program TMMD, semakin banyak yang berpartisipasi kita juga senang maka pelaksanaan program TMMD semakin banyak kegiatan yang dikerjakan sebaliknya ketika yang berpartisipasi sedikit, semakin sedikit juga kegiatan yang dikerjakan diprogram TMMD. Kita juga tidak bisa memaksakan semua organisasi pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi, mungkin organisasi pemerintah daerah yang tidak bisa berpartisipasi karena tidak ada anggaran kan kita juga tidak bisa paksakan.” (Wawancara 9 November 2017)

Dari hasil wawancara atas dengan para informan dapat diketahui bahwa, kewenangan yang dilaksanakan diprogram TMMD hanya berupa pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing instansi, selain itu para pelaksana program TMMD kurang tegas dalam mengajak instansi perangkat daerah lain dan masyarakat untuk berpartisipasi diprogram TMMD.

3.3.3 Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum menuturkan tentang komitmen dalam melaksanakan program TMMD di Kota Semarang :

“Kita sudah ada komitmen dari awal. karena mewakili Wali Kota agar program TMMD agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran program TMMD.” (Wawancara 9 November 2017)

Senada dengan informan 1, informan 2 selaku Kaur Bakti TNI menyatakan komitmen dalam melaksanakan program TMMD :

“Kodim mempunyai komitmen untuk melaksanakan program TMMD dengan sepenuh hati selain dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita juga diharapkan juga dapat membentuk rasa sengkuyung antara TNI dengan masyarakat.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Komitmen dari seluruh pelaksana program TMMD yang diwakili oleh Kodim 0733/BS dan Sekertariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan, dengan dilaksanakannya program TMMD di Kota Semarang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan membangkitkan lagi rasa sengkuyung antara TNI dengan masyarakat. Fenomena selanjutnya adalah kejujuran, setiap pelaksana program TMMD mempunyai cara tersendiri untuk menumbuhkan sikap kejujuran agar program TMMD dapat berjalan secara maksimal. Menurut informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan Umum sebagai berikut :

“Untuk kejujuran kita selalu melakukan pengawasan baik itu penganggaran maupun pelaksanaan agar program TMMD berjalan

maksimal dan tidak ada penyelewengan atau kecurangan yang dapat merugikan semua pihak.” (Wawancara 9 November 2017)

Selanjutnya informan 2 menuturkan cara untuk menumbuhkan sikap kejujuran untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang :

“Menumbuhkan sikap kejujuran sendiri dari lingkungan TNI sendiri melakukan pembinaan dan tentunya motivasi langsung dari dandim kepada tentara yang nanti ditugaskan.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Cara menumbuhkan sikap kejujuran kepada para pelaksana program TMMD di Kota Semarang dengan melakukan pengawasan saat penganggaran serta pelaksanaan dan motivasi dari pimpinan Kodim kepada tentara yang akan melaksanakan program TMMD.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi dari program TMMD di Kota Semarang yang mencakup komitmen dan kejujuran dari para pelaksana sudah cukup baik, dapat dilihat dari komitmen para pelaksana menjalankan program TMMD dengan sungguh – sungguh agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu cara menumbuhkan sikap kejujuran dengan melakukan pengawasan saat penganggaran dan pelaksanaan dapat terhindar dari tindak kecurangan yang dapat merugikan semua pihak.

3.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas memimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). Menurut informan 2 selaku Kaur Bakti TNI mengenai SOP dalam melaksanakan program TMMD, yaitu :

“Kalau SOP ataupun tata tertib itu di tentukan oleh PJO atau Penanggung Jawab Operasional dari atasan TNI kita laksanakan dengan petunjuk beliau, melalui buku tata cara pelaksanaan program TMMD, dari komando atas TNI juga mengirimkan surat telegram untuk Kodim, secara garis besar isian dari buku petunjuk pelaksanaan program TMMD yaitu perencanaan, kemudian kita juga survey sasaran, seperti apakah benar Bapak A berdomisili di kelurahan B RT C RW D, setelah itu kita juga melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kota/Kabupaten, lalu ketahap persiapan baik material maupun personil, tentang bekerjanya personil/prajurit tersebut untuk menjaga keamanan di lapangan.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Hal berbeda diutarakan oleh informan 1 selaku Staff Subbag Pemerintahan

Umum mengenai ketersediaan SOP dalam melaksanakan program TMMD :

“Untuk SOP tertulis itu tidak ada, untuk pelaksanaan dan perencanaan biasanya setiap instansi sudah paham akan tugas dan fungsinya masing – masing dalam menjalankan program TMMD.” (Wawancara 9 November 2017)

Senada dengan informan 1, informan 3 selaku Staff Subbag Perencanaan

Umum tentang ketersediaan SOP dalam melaksanakan program TMMD, sebagai berikut:

“SOP untuk melaksanakan program TMMD saya rasa untuk yang tertulis itu tidak ada. Tetapi kalau ada SOP untuk Kodim dalam melaksanakan program TMMD dari Kodam saya juga kurang paham, untuk dilingkungan pemerintah dalam melaksanakan program TMMD itu tidak ada SOP tertulisnya.” (Wawancara pada 11 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa SOP pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang dari pihak pemerintah menyatakan, selama pelaksanaan program TMMD tidak ada SOP secara tertulis karena pemerintah sudah mengerti tugas dan fungsi masing – masing instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program TMMD. Dari pihak Kodim mengemukakan bahwa

SOP untuk melaksanakan program TMMD ditentukan oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO) dari atasan.